

BAB IV

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS EKSPOR MINYAK SAWIT

Setelah adanya penurunan nilai ekspor terhadap salah satu komoditas andalan tersebut, tentunya pemerintah tidak hanya tinggal diam. Pemerintah Indonesia dengan tegas, mengatakan bahwa akan mempersiapkan adanya beberapa strategi-strategi untuk tetap dapat menstabilkan komoditas minyak sawit di pasar global. Pemerintah tidak ingin apabila isu deforestasi (kampanye negatif) tersebut berlanjut terus menerus, sehingga pemerintah telah mengambil langkah melalui beberapa strategi yang nantinya diharapkan akan berpengaruh besar untuk menjaga stabilitas minyak sawit. Dalam lingkup pemerintah Indonesia, tentunya telah melibatkan beberapa aktor (beberapa kementerian) untuk dapat mewujudkan strategi tersebut. Seperti halnya, keberadaan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan), sangat erat kaitannya terhadap masalah tersebut.

Oleh sebab itu, pada pembahasan di bab IV akan dipaparkan mengenai analisis strategi-strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas minyak sawit setelah adanya isu deforestasi. Strategi-strategi tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adanya revitalisasi terhadap ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) sebagai regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang diberlakukan oleh Kementerian Pertanian serta visi-misi dan tujuan Kementan. Dan yang kedua, adanya diplomasi sawit yang berupa promosi serta seminar mengenai komoditas minyak sawit. Strategi ini merupakan strategi yang dirancang oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Serta mencantumkan pula visi-misi dan tujuan (rencana strategis) Kemendag yang relevan. Yang membuktikan bahwa langkah strategis yang diambil sesuai dengan penerapan visi-misi serta tujuan baik Kemendag maupun Kementan.

A. Visi – misi Kementerian Pertanian RI dan Strategi revitalisasi penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) melalui visi- misi serta tujuan yang telah ditetapkan melalui rancangan rencana strategis yang telah disusun pada periode awal pemilihan presiden. Sehingga, setiap masa kepemimpinan pemerintah Indonesia dipastikan memiliki rencana strategis pada masa kepemimpinannya, hal tersebut tertuang kedalam rencana strategi pada tahun 2015-2019, antara pemerintah Indonesia dan Kementerian Pertanian RI. Sehingga, diharapkan kedepannya strategi-strategi yang telah dirancang tersebut dapat terealisasi dengan baik. Terkait, dengan adanya dampak dari isu kerusakan lingkungan terhadap minyak sawit yang berperangaruh besar terhadap mutu dan kualitas minyak sawit tersebut. Sebelum dilakukannya kegiatan ekspor minyak sawit, dibutuhkan adanya proses produksi minyak sawit dalam negeri yang sesuai dengan kualitas serta mutu standar komoditas tersebut.

Sehingga, keberadaan kementerian pertanian dapat memastikan hal tersebut layak atau tidak layak untuk di produksi. Jika lebih difokuskan kembali Kementerian Pertanian RI dibagi oleh beberapa direktorat, termasuk Direktorat yang memiliki peranan penting akan perkembangan komoditas minyak sawit ini. Direktorat tersebut ialah Direktorat Jenderal Perkebunan, yang mana posisi Ditjenbun tersebut berkaitan terhadap pembangunan produksi minyak sawit secara optimal sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Disini kemudian akan dijelaskan mengenai visi-misi serta tujuan Kementan seperti yang telah diatur didalam rencana strategis pada tahun 2015-2019, seperti berikut isinya:

Visi Kementerian Pertanian:

Adanya visi misi pemerintah Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sehingga, dengan memperhatikan visi pemerintah

tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Misi Kementerian Pertanian:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dengan ditetapkannya visi misi tersebut tidak terlepas dari tujuan dibuatnya visi misi tersebut. Terealisasinya visi dan misi tersebut diharapkan dapat selaras dengan tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang telah diharapkan pula. Berikut merupakan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari visi-misi tersebut. Pertama, meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian. Ketiga, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dan terakhir kelima, meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.¹ Adapun sasaran rencana strategi Kementan terhadap pembangunan pertanian kedepannya, salah satunya ialah peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

Hal tersebut tentunya sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat mengalami ancaman terhadap

¹ <http://www.pertanian.go.id>, dalam “RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019, (diakses pada 15 Maret 2018 pukul 11:47)

komoditas andalan tersebut. Selain itu, jika dikerucutkan lebih lagi pada dasarnya Direktorat Jenderal Perkebunan yang lebih berpengaruh terhadap pembangunan minyak sawit tersebut. Dimana dalam visi-misi yang telah ditetapkan oleh Dekjenbun dapat menunjang mutu komoditas tersebut, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu strategi pemerintah (kementerian pertanian) khususnya Direktorat Jendral Perkebunan terfokus pada ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang mana mencangkup syarat atau sertifikat perjininan, standar dipasar global serta sebagai regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Hal tersebut dikutip dari visi-misi Direktorat Jenderal Perkebunan. Berikut beberapa poin dari visi-misi Dikjenbun yang terkait terhadap komoditas minyak sawit. Visi-misi pembangunan perkebunan Indonesia seusia dengan rencana strategis pada tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan:

Visi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan, dalam rangka mendukung.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan:

- a. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim
- b. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan
- c. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan

seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain

- d. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan²

Visi dan misi diatas tersebut merupakan poin-poin yang berkaitan langsung dengan komoditas minyak sawit. Ditjenbun menjelaskan bahwa akan memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Langkah revitalisasi tersebut yang dijalankan oleh Kementan merupakan langkah efektif, dimana saat ini negara-negara pengimpor membutuhkan adanya pengakuan bahwa Indonesia dalam produksi minyak sawit tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan baik dari segi mutu, maupun upaya memelihara lingkungan. Sehingga, melalui ISPO tersebut isu deforestasi minyak sawit serta resolusi minyak sawit Uni Eropa akan terbantahkan.

Adanya strategi Revitalisasi ISPO akan menjadi nilai tambah kelapa sawit ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program sertifikasi dan penguatan pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kontribusi kelapa sawit pada perekonomian global dan nasional, hambatan produk sawit di pasar dunia, strategi penguatan ISPO di pasar global, serta penguatan citra produk kelapa sawit di pasar ekspor melalui diplomasi serta kemitraan yang luas sebagai salah satu upaya menghindari kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Sertifikasi ini memastikan agar kelapa sawit yang dijual tak berasal dari lahan yang membuka hutan lindung atau lahan konservasi dan tak melakukan pelanggaran baik terhadap lingkungan maupun manusia dalam proses produksinya, sehingga konsumen merasa aman dalam

² <http://ditjenbun.pertanian.go.id>, dalam “Visi-Misi”, (diakses pada 15 Maret 2018, pukul 12:08)

menggunakannya. Adapun beberapa manfaat dibentuknya ISPO tersebut, berikut contohnya:

1. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha di bidang kelapa sawit untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
2. Meningkatkan kesadaran lingkungan
3. Meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional
4. Mendorong usaha perkebunan agar mentaati peraturan pemerintah³

Adanya revitalisasi terhadap ISPO tersebut dikarenakan adanya ISPO nomor 19 tahun 2011 sudah mendekati batas akhir pendaftaran ISPO akhir Desember 2014. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian berencana untuk memperbarui Menteri Pertanian (Permentan) yang sesuai terhadap UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan pembangunan perkebunan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. Sehingga, kebijakan Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Permentan No 11 tahun 2015.⁴ ISPO telah mencakupi semua yang diharapkan oleh dunia internasional yaitu mendorong usaha perkebunan untuk mematuhi semua peraturan pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan dan melaksanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

Awal mula, perkembangan ISPO dimulai dari adanya permintaan di pasar Eropa dan Amerika yang menyatakan bahwa meminta agar produk kelapa sawit asal Indonesia yang akan dijual di sana memiliki sertifikasi RSPO. Roundtable on Sustainable Palm Oil merupakan respon terhadap tekanan global yang mendesak terhadap produksi minyak sawit

³ <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id>, dalam “Sertifikasi ISPO untuk Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan”, (diakses pada 30 Maret 2018, 21:20)

⁴ <http://ditjenbun.pertanian.go.id>, dalam “ISPO Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan”, (diakses pada 10 Maret 2018 pukul 21:49)

berkelanjutan, dan dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.⁵ Sebelum, terbentuknya ISPO, Indonesia memberlakukan RSPO sebagai sertifikat standar minyak sawit. Namun hal ini dianggap kurang efektif, dan Indonesia ingin memperbarui sertifikat dan standar baru sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, kemudian terlahirlah ISPO sebagai standar ekspor minyak sawit Indonesia di pasar global.

Ketidakefektifan RSPO juga dirasakan oleh GAPKI sebagai asosiasi mengundurkan diri dari keanggotaan RSPO karena lebih pro dan akan mendukung ISPO. Hal tersebut kemudian diperjelas oleh Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI yang berpendapat bahwa RSPO dan ISPO kedua sistem sertifikasi tersebut “hanyalah alat”, karena yang terpenting, ia ingin agar ISPO juga dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah dan industri serta pelaku usaha mengelola kelapa sawit secara berkelanjutan. Sementara itu Herdradjat Natawidjaja, Kepala Sekretariat Komisi ISPO, menyatakan bahwa pasar Eropa memang mensyaratkan agar produk kelapa sawit yang masuk ke sana harus sesuai standar lingkungan, namun syarat pemenuhan standar tersebut “tidak ada 'harus RSPO', tidak ada 'harus ISPO', sehingga Indonesia punya standar sustainability yaitu ISPO itu.”⁶

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa ternyata Indonesia telah menetapkan standarnya sendiri, sehingga nantinya diharapkan bahwa adanya penerapan ISPO tersebut lebih efektif dibandingkan RSPO sebelumnya. Jika semua perusahaan kelapa sawit bisa menerapkan kriteria ISPO, yang berarti tunduk pada aturan di republik, aturan di republik itu mencegah deforestasi, memperbaiki kondisi lingkungan,

⁵ <https://www.rspo.org>, dalam “Studi Bersama Ispo-Rspo Sebuah Pencapaian Penting Dalam Kerjasama Mewujudkan Minyak Sawit Berkelanjutan Di Indonesia”, (diakses pada 30 Maret 2018 pukul 22:04)

⁶ <http://www.bbc.com>, dalam “Upaya memastikan bisnis kelapa sawit Indonesia ramah lingkungan”, (diakses pada 15 Maret 2018, pukul 12:40)

mengurangi emisi rumah kaca, dan memastikan soal-soal kesejahteraan (masyarakat).

Seperti yang dipaparkan bahwa adanya perbedaan antara kedua sertifikasi ini, jika ISPO menurutnya lebih kuat menjawab soal status legalitas perusahaan dan praktik lingkungan, sementara RSPO memberi keyakinan pada pasar global akan kelapa sawit yang ramah lingkungan. selain itu, adanya revitalisasi ISPO dipaparkan oleh Kementerian Pertanian yang telah memperbarui regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Permentan No 11 tahun 2015.⁷ Sebagai kemajuan dari penerapan ISPO tersebut dapat dirasakan karena adanya perubahan yang signifikan. Seperti halnya, sudah 266 perusahaan kelapa sawit yang mengantongi ISPO dari perusahaan yang mengajukan audit ke lembaga sertifikasi sebanyak 535 perusahaan.

Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia tercatat sekitar 1.600. Untuk lahan perkebunan rakyat yang dinyatakan lolos ISPO sebanyak 2 koperasi, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan Asosiasi Petani Swadaya “AMAN”. Luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini mencapai 11,3 juta hektar (Ha). Lahan yang sudah memenuhi persyaratan ISPO seluas 1,4 juta Ha. Hingga, saat ini 11 April 2017, sudah 266 perusahaan kelapa sawit yang mengantongi ISPO dari perusahaan yang mengajukan audit ke lembaga sertifikasi sebanyak 535 perusahaan. Komisi ISPO bulan Maret 2017 yang lalu, dari 376 laporan hasil audit (LHA) yang sudah mendapat pengakuan, 11 perusahaan ditunda penetapannya karena belum memenuhi persyaratannya seperti legalitas lahan, HGU nya berada kawasan hutan, belum ada izin AMDAL; 69 belum dilakukan verifikasi dan 30 laporan hasil audit yang telah diverifikasi belum di tanggap oleh Lembaga Sertifikasi.

Dengan adanya pembaruan ISPO yang mulanya merupakan pedoman kemudian menjadi sistem yang bersifat

⁷ <http://ditjenbun.pertanian.go.id>, dalam “ISPO Mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan”, (diakses pada 15 Maret 2018, pukul 12:42)

wajib diterapkan oleh perusahaan berbasis minyak sawit tersebut. Jika ditelusuri tentunya antara pedoman dan sistem tersebut sangatlah berbeda, yang mana pedoman hanya sebagai acuan standar pada ISPO tersebut, kemudian diperbarui menjadi sistem yang mana merupakan sesuatu yang harus diterapkan dan bersifat wajib. Dengan adanya perbaruan Permentan pada tahun 2015 tersebut tentunya berkaitan untuk mengatasi akibat dari adanya isu deforestasi. Yang mana, dengan adanya ISPO sebagai sertifikat standar minyak sawit dipasar global yang wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan sawit di Indonesia. Diharapkan kedepannya tidak ada hambatan, untuk industri persawitan Indonesia memasuki pasar dunia. Karena pada *basicnya* perusahaan minyak sawit telah mengantongi ISPO.

Adanya permintaan negara-negara baik pengimportir minyak sawit ataupun yang belum menjalin kerjasama ekspor, menginginkan adanya legilitas sertifikat sebagai standar minyak sawit tersebut untuk memasuki pasar negara tersebut. Diharapkan dengan perbaruan Permentan melalui sistem ISPO dapat kembali mempertahankan dan menjaga stabilitas ekspor Indonesia terutama setelah adanya isu deforestasi. Konsumen minyak sawit utamanya di UE menginginkan minyak sawit yang berkelanjutan karena perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab utama dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca.⁸ Oleh sebab itu, Kementan sangat berharap lebih terhadap para pemangku usaha yang berbasis minyak sawit, agar dapat memiliki sertifikat ISPO. Sehingga, perusahaan nasional dapat mengekspor minyak sawitnya ke pasar global, selain itu dapat memastikan bahwa minyak sawit Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Adanya ISPO tersebut dapat dipastikan bahwa industri minyak sawit Indonesia telah menetapkan aturan-aturan yang sesuai dengan standar mutu yang ada sehingga pentingnya bagi seluruh perusahaan berbasis komoditas minyak sawit

⁸ <http://www.kemendag.go.id>, dalam “Wamendag Debat Mengenai Sustainable Palm Oil di Parlemen Eropa, pada 20 Maret 2014, (diakses pada 11 November 2017)

memegang ISPO tersebut sebagai standar minyak sawit untuk memasuki pasar global dengan aman, tanpa adanya isu maupun kampanye. Dikarenakan minyak sawit mentah tersebut telah memenuhi standar. Seperti halnya, yang ada didalam peraturan menteri pertanian republik indonesia mengenai prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia ISPO (indonesian sustainable palm oil) untuk usaha kebun swadaya, yang menjelaskan bahwa penerapan pedoman teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit.

Pada pembukaan lahan, harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah, air dan tidak dengan membakar (mengacu pada pedoman teknis pembukaan lahan tanpa bakar, ditjenbun kementerian pertanian). Selain itu, penanaman pada lahan gambut, menjelaskan penanaman kelapa sawit di kebun Pekebun swadaya di lahan gambut dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.⁹ Selain ISPO, pemerintah juga melakukan strategi berupa diplomasi sawit yang dijalankan oleh Kemendag.

B. Visi – misi Kementerian Perdagangan RI dan Strategi Diplomasi minyak sawit

Kementerian perdagangan melalui visi-misi serta tujuan yang telah ditetapkan diharapkan akan dapat menjawab strategi-strategi apa saja yang akan dijalankan untuk dapat meningkatkan kembali ekspor minyak sawit yang telah mengalami penurunan di tahun 2015 serta dapat menstabilkan ekspor minyak sawit, sehingga dapat mempertahankan Indonesia sebagai produsen terbesar komoditas minyak sawit. Adapun beberapa visi-misi yang relevan terhadap keberadaan komoditas. Ada beberapa poin yang mencangkup mengenai ekspor non-migas. Kementerian perdagangan dalam visimisinya yang tercantum disebut sebagai rencana strategis

⁹ <http://www.ispo-org.or.id>, dalam “prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia (indonesian sustainable palm oil/ispo) untuk usaha kebun swadaya”, (diakses pada 27 April 2018, pukul 3:03)

tahun 2015-2025, seperti berikut visi misi menurut pemerintah Indonesia dan visi misi Kemendag:

Visi :

Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka VISI pemerintahan tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi pemerintahan periode 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
- b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas dan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Selain itu, dengan ditetapkannya visi-misi tersebut tentunya dilatar belakangi oleh adanya tujuan visi misi dari pemerintah Indonesia dan Kementerian Perdagangan yang menyangkut komoditas minyak sawit, berikut tujuan yang dimaksud:

- a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
- b. Peningkatan pengamanan perdagangan
- c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
- d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
- e. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
- f. Peningkatan perlindungan konsumen
- g. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan
- h. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian¹⁰

Berikut merupakan visi misi serta tujuan yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil presiden serta Kementerian Perdagangan dalam rencana strategis tahun 2015-2019. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing direktorat terkait seperti salah satunya, direktorat jenderal pengembangan ekspor nasioanl. DJPEN (direktorat jenderal pengembangan ekspor nasional) telah banyak terlibat dalam mengurus ekspor non-migas (termasuk minyak sawit). Sehingga, didalam visi-misi DJPEN lebih tercantum jelas

¹⁰ <http://www.kemendag.go.id>, dalam "RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015 – 2019", (diakses pada 15 Maret 2018, pukul 1:37)

bahwa adanya usaha pembangunan ekspor non-migas, seperti berikut isinya:

Visi adalah:

Menjadi manifestasi daya saing produk non-migas Indonesia di pasar global dan mengintensifkan peran ekspor non migas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi adalah:

- a. Meningkatkan daya saing produk dan layanan ekspor
- b. Meningkatkan kompetensi eksportir untuk menembus pasar global
- c. Memperluas kualitas layanan utama untuk pemain bisnis
- d. Memperkuat lembaga-lembaga pengembangan ekspor
- e. Meningkatkan profesionalisme petugas, transparansi dan akuntabilitas kinerja¹¹

Dalam menjalankan maupun mewujudkan visi misi tersebut tentunya aktor yang terlibat tidak hanya Kementerian Perdagangan beserta Direktorat Jendral Perdagangan Ekspor Nasional bahkan telah melibatkan pula Kementerian Luar Negeri. Dikarenakan ekspor non-migas tersebut cangkupannya merupakan internasional, oleh sebab itu adanya keterlibatan Kemenlu sebagai penghubung. Kondisi non-migas Indonesia khususnya minyak sawit telah banyak mendapatkan tantangan (ancaman) setelah adanya kampanye negatif (kerusakan lingkungan) terhadap minyak sawit. Ancaman tersebut tentunya menjadi pukulan bagi pemerintah Indonesia, sehingga hal tersebut yang memicu pemerintah Indonesia (Kemendag) untuk mengambil langkah serta rencana strategis untuk melawan bahkan menghadapi isu deforestasi dan resolusi minyak sawit Uni Eropa tersebut.

¹¹ <http://djpen.kemendag.go.id>, dalam “Visi-misi dan Nilai Strategis DJPEN”, (diakses pada 15 Maret 2018 pukul 1:56)

Strategi tersebut dilaksanakan setelah adanya kampanye negatif. Strategi yang paling utama dijalankan oleh Kemendag ialah diplomasi sawit. Diplomasi pada umumnya merupakan proses kegiatan negoisasi diantar negara, negoisasi tersebut dijalankan dengan beberapa cara diantaranya lobbying maupun kunjungan antar negara bahkan promosi yang menyangkut perekonomian negara tersebut. Diplomasi dalam konteks yang dimaksud adalah diplomasi sawit, sehingga diplomasi (negoisasi) yang dilakukan hanya seputar komoditas minyak sawit. Diplomasi sawit yang dijalankan oleh Kemendag ada beberapa kegiatan seperti, seminar maupun promosi. Diplomasi sawit ini dijalankan di beberapa negara, baik yang sudah mengimpor minyak sawit ataupun yang belum bekerjasama. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan minyak sawit Indonesia yang sudah lengkap dengan ISPO yang diperbarui.

Diplomasi sawit yang dilakukan di beberapa negara tersebut dianggap efektif karena adanya hubungan luar negeri secara langsung melalui negoisasi kemudian promosi ke beberapa negara. Indonesia terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan sektor sawit Indonesia yang berkelanjutan. Tentunya Kemendag tidak bekerja dan berusaha sendiri, karena adanya aktor-aktor lain yang turut untuk ingin mempertahankan komoditas andalan tersebut. Berikut merupakan, kegiatan-kegiatan dari adanya diplomasi sawit yang dilakukan di beberapa negara. Untuk memperkuat diplomasi sawit di dunia, Ir.Arlinda (DJPEN) melakukan promosi sawit saat kunjungan kerja ke Prancis selama 27 Februari-1 Maret 2017. Arlinda mengunjungi kantor Aliansi Prancis (the French Alliance for Sustainable Palm Oil). Maksud dan tujuan dari diplomasi sawit tersebut adanya upaya-upaya Indonesia dalam menciptakan sektor sawit Indonesia yang berkelanjutan. Promosi terhadap sawit Indonesia yang berkelanjutan akan terus gencar dilakukan di negara mitra dagang. Kolaborasi dengan stakeholders lokal di Prancis perlu dibina untuk menggalang dukungan terhadap sawit Indonesia.

Kemendag juga menggaris bawahi pentingnya kolaborasi yang kuat guna mendukung industri kelapa sawit. Kemendag akan fokus memacu ekspor ke negara-negara pasar baru dan negara-negara berkembang di mana Indonesia memiliki posisi tawar yang relatif tinggi, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika bagian selatan. Selain itu, kegiatan lain yang sudah dijalankan adalah, Selain itu diplomasi yang dilakukan dengan delegasi gabungan Indonesia yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Telah gencar mempromosikan kelapa sawit kepada kalangan bisnis di Swiss dalam bentuk Indonesia Business Forum Sustainable Palm Oil in Global Market di Gedung Zunfthaus zur Meisen, Zurich. Delegasi gabungan Indonesia gencar mempromosikan kelapa sawit kepada kalangan bisnis di Swiss dalam bentuk Indonesia Business Forum Sustainable Palm Oil in Global Market di Gedung Zunfthaus zur Meisen, Zurich. Kemudian, seminar dan promosi juga dilakukan di negara sakura Jepang. DJPEN, Ir. Arlinda menghadiri Seminar dan Business Matching “Industri Kelapa Sawit Indonesia: Peluang Bisnis untuk Jepang” di Osaka, Jepang pada Juli 2017. Acara ini diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal RI dan Indonesia Trade Promotion Center di Rihga Royal Hotel.¹² Seminar dihadiri oleh lebih dari 120 pelaku usaha dari Tokyo dan Osaka. Maksud dan tujuan seminar tersebut memaparkan bahwa Indonesia memberikan peluang Industri kelapa sawit Indonesia bagi semua para pelaku usaha di Jepang.

Diplomasi sawit dilakukan oleh Indonesia sejak awal tahun 2017 hingga saat ini. Karena isu deforestasi tersebut

¹² <http://www.kemendag.go.id>, dalam “Seminar dan Business Matching Palm Oil Indonesia di Osaka, Jepang”, (diakses pada 15 Maret 2018, pukul 11:30)

sangat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan ekspor Indonesia. Tentunya pemerintah tidak akan diam jika isu deforestasi tersebut dan resolusi minyak sawit Uni Eropa menjadi penghalang ekspor komoditas ini dipasar dunia. Bahkan, pemerintah Indonesia mengecewakan adanya resolusi minyak sawit Uni Eropa yang dianggap hal tersebut merupakan tindakan diskriminatif terhadap minyak sawit Indonesia. Namun, hal ini memotifasi Indonesia sehingga pada akhirnya pemerintah (Kemendag), mengambil langkah strategis untuk dapat melindungi minyak sawit.

Dengan semakin maraknya kampanye-kampanye negatif terhadap persawitan Indonesia baik sebelum maupun sesudah keluarnya resolusi minyak sawit Uni Eropa. Tentunya menjadi kekhawatiran sendiri untuk Indonesia, apabila kampanye kampanye tersebut memberikan stigma negatif terhadap minyak sawit Indonesia yang vulgar di negara bagian Eropa, justru kini ditambah dengan adanya resolusi minyak sawit oleh Uni Eropa. Tentunya Indonesia ingin mempertahankan komoditas minyak sawit agar dapat terus menjadi komoditas andalan baik di dalam negeri maupun diluar. Indonesia semakin gencar melakukan diplomasi sawit terlebih dengan adanya resolusi sawit tersebut. diplomasi sawit telah gencar dilakukan di beberapa negara termasuk di negara bagian Eropa yang mana merupakan negara yang banyak melemparkan kampanye-kampanye negatif hingga akhirnya muncul resolusi tersebut.

Sebelum adanya resolusi tersebut pemerintah Indonesia (Kemendag dan Kemenlu) telah gencar melakukan diplomasi sawit di beberapa negara Eropa. Seperti Perancis pada bulan Februari-Maret, selain itu Indonesia siap memenuhi permintaan 100% minyak sawit berkelanjutan untuk mendukung Deklarasi Amsterdam. Deklarasi Amsterdam adalah deklarasi yang ditandatangani pada 7 Desember 2015 oleh Belanda, Jerman, Denmark, Inggris, dan Perancis serta didukung Norwegia. Deklarasi Amsterdam mendukung diterapkannya 100% sustainable palm oil pada rantai nilai palm oil di Uni Eropa tahun 2020. Selain di Perancis,

pemerintah juga melakukan diplomasi sawit di Rusia. Kini setelah adanya resolusi tersebut tentunya pemerintah dengan tegas dan segera untuk membentuk langkah-langkah strategi kedepannya agar tidak dapat menghalangi minyak sawit dipasar global. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari semakin maraknya kampanye negatif serta munculnya resolusi sawit Uni Eropa. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah strategis untuk meyakinkan Komisi Eropa agar mengabaikan resolusi Parlemen Eropa yang memojokkan persawitan Indonesia.

Delegasi Indonesia telah mengunjungi markas besar Komisi Eropa di Brussels, Belgia, yang menandai awal negosiasi sawit. Pada September 2017, Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) berencana untuk melakukan lobi lanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka mata Komisi Eropa untuk tidak menindaklanjuti resolusi Parlemen Eropa yang tercantum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Jika tidak berhasil, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk membawa perkara ini ke World Trade Organization (WTO).¹³ Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai adanya isu berisikan kampanye-kampanye negatif yang akan merugikan industri kelapa sawit dimasa mendatang.

Dengan adanya strategi-strategi seperti revitalisasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan diplomasi sawit, diharapkan akan dapat berpengaruh baik terhadap minyak sawit mentah, sehingga dapat mempertahankan komoditas ini terus menjadi andalan. Kedua strategi tersebut dianggap efektif hingga saat ini hal tersebut didukung oleh adanya perubahan (peningkatan) dari kedua strategi tersebut. Apabila di telaah lebih lanjut satu persatu dari strategi tersebut, bahwa adanya revitalisasi ISPO (sertifikat) ataupun pembaharuan peraturan ISPO yang tadinya berupa pedoman, hingga diperbarui menjadi sistem yang mana wajib diterapkan oleh

¹³ <https://www.kemlu.go.id>, dalam “Diplomasi Sawit: Kemlu Siapkan Amunisi Hadapi Kampanye Negatif”, (diakses pada 29 April 2017, pukul 17:41)

semua perusahaan berbasis sawit. Sehingga, dengan ini ISPO merupakan langkah yang tepat untuk membentuk standar serifikat minyak sawit di pasar global sendiri. Hal ini dianggap efektif karena sejak diberlakukan ISPO pada awal sejak tahun 2011 hingga saat ini, Terdapat tambahan 42 perusahaan perkebunan kelapa sawit menerima sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebelumnya ada 184 perusahaan yang sudah kantong ISPO.

Dengan demikian, hingga kini ada 226 perusahaan yang telah mengantongi sertifikat yang wajib dimiliki perkebunan kelapa sawit tersebut.¹⁴ Tentunya hal ini selaras dengan tujuan awal pemerintah dengan menerapkan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Begitupun dengan diplomasi sawit, hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya peningkatan dari jumlah ekspor setelah adanya penurunan ekspor yang akibatkan oleh isu deforestasi tersebut. Pada tahun 2014 \$ 21.7 (USD Billions), di tahun 2015 mengalami penurunan akibat maraknya isu kerusakan lingkungan terhadap minyak sawit sehingga hanya memperoleh \$ 17.6, dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2016 meskipun angka masih stabil \$ 17.73. Namun, kabar baiknya di tahun 2017, dimana pada tahun 2017, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 22,97 miliar dollar AS. Angka ini naik 26 persen dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 18,22 miliar dollar AS.¹⁵

¹⁴ <https://industri.kontan.co.idm> dalam “Ada 226 perusahaan sawit kantong sertifikat ISPO”, (diakses pada 16 Maret 2018, pukul 9:02)

¹⁵ <https://ekonomi.kompas.com>, dalam “Pada 2017, Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang sejarah”, (diakses pada 16 Maret 2018, pukul 9:18)